

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi tiga prioritas pembangunan pendidikan nasional, meliputi 1. pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 2. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3. penguatan tata kelola dan pencitraan publik. Ketiga prioritas pembangunan pendidikan nasional tersebut menghendaki agar pemerintah memanfaatkan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan seoptimal mungkin untuk memacu pembangunan pendidikan daerah dalam rangka membangun pendidikan nasional secara keseluruhan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan memegang peran penting dalam pembangunan nasional. Melalui pendidikan yang baik, akan lahir manusia Indonesia yang mampu bersaing di era globalisasi bercirikan *high competition*. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan mutlak bagi umat manusia. Oleh karena itu, pendidikan tidaklah sekedar transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*). Tujuan pendidikan sesungguhnya menciptakan pribadi yang memiliki sikap dan kepribadian yang positif. Pendidikan juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, serta dalam konteks lebih luas merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh.

Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan, maka selayaknya pendidikan dijadikan prioritas utama pembangunan baik di pusat, provinsi maupun daerah. Salah satu prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rentang tahun 2016-2020 adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Dari program prioritas di atas terlihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan juga fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Untuk mengaplikasikan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan mengamanatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan dan melaksanakan program prioritas yang ditetapkan tersebut. Walaupun pendidikan menjadi urusan wajib dan termasuk program yang diprioritaskan namun hanya didukung anggaran berkisar 8,1 % dari total belanja langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di luar pembiayaan gaji pada tahun 2016. Perhitungan ini berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Walaupun anggaran pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan belum mencapai mencapai 20 % di luar gaji seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional namun yang perlu diperhatikan adalah setinggi apapun biaya yang dianggarkan untuk pendidikan, tetap saja pemerataan akses menjadi indikator terkuat keberhasilan pembangunan pendidikan di daerah. Seyogyanya pendidikan harus dapat dinikmati oleh semua warga negara baik di perkotaan maupun pedesaan, dan masyarakat di segala lapis ekonomi. Untuk itu peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan selayaknya mendapat perhatian yang serius sehingga seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dimanapun berada dapat mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya sampai pendidikan dasar yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk mencetak masyarakat yang siap dengan ilmu pengetahuan dan mental untuk berkarya dalam masyarakat, hendaknya menempuh pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sekalipun upaya-upaya peningkatan pembinaan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Pesisir Selatan memperlihatkan kecenderungan ke arah yang lebih baik, namun masih menemukan berbagai permasalahan. Permasalahan itu adalah:

1. Permasalahan ketersediaan layanan pendidikan. Permasalahan ini menggambarkan adanya masalah dalam pemberian jaminan ketersediaan tempat bagi anak usia sekolah yang memadai. Ketersediaan tempat ini dapat dalam bentuk dimensi ketersediaan akses maupun mutu.
2. Permasalahan keterjangkauan layanan pendidikan. Permasalahan ini mempunyai dua makna yaitu permasalahan dalam arti geografis dan permasalahan dalam arti ekonomi.

3. Permasalahan peningkatan mutu pendidikan. Permasalahan ini dapat di selesaikan dengan perbaikan sarana dan prasarana serta mutu guru.
4. Permasalahan kesetaraan pendidikan. Permasalahan ini diartikan kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi berdasarkan pada latar belakang sosial siswa.
5. Permasalahan kepastian pendidikan. Permasalahan ini diartikan pada tingkat kepastian untuk mendapatkan tempat ketika peserta didik melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah salah satu indikator pendidikan yang dapat mencerminkan permasalahan yang telah di uraikan. Pada tahun pelajaran 2014/2015 APK Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 97,21% untuk jenjang SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun). Persentase ini terus bergerak naik seiring dengan naiknya tahun pelajaran hingga mencapai angka 98,42% untuk tahun pelajaran 2015/2016. Untuk jenjang usia SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Pesisir Selatan memiliki APK 72,11% untuk tahun pelajaran 2014/2015 dan 82,97% untuk tahun pelajaran 2015/2016. Lain hal dengan APM, untuk jenjang SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun) 82,75 % untuk tahun pelajaran 2014/2015 dan 85,14% untuk tahun pelajaran 2015/2016. Untuk jenjang usia SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Pesisir Selatan memiliki APM 61,76% untuk tahun pelajaran 2014/2015 dan 69,5% untuk tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin banyak pula anak-anak di usia jenjang pendidikan tersebut tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini cukup mengindikasikan bahwa ada permasalahan seperti yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya.

Ketersediaan sarana, prasarana yang memadai dan kualitas tenaga kependidikan yang profesional merupakan faktor yang sangat vital bagi peningkatan akses layanan dan mutu pendidikan. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkualitas akan semakin efektif proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan dan siswa akan semakin mudah menyerap setiap materi yang diajarkan. Ketersediaan sarana dan prasana, ketersediaan guru yang berkualitas, pengawasan yang efektif adalah hal

yang disyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar. SPM pendidikan dasar ini harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan seiring dengan usaha membenahi kekurangan-kekurangan di bidang pendidikan.

SPM pendidikan dasar bagi kabupaten/kota terdiri atas 14 indikator dikelompokkan ke dalam aspek ketersediaan, kualifikasi, dan kompetensi guru/kepala sekolah serta ketersediaan, kualifikasi, kompetensi pengawas, dan frekuensi pengawasan. Adapun SPM bagi satuan pendidikan terdiri atas 13 indikator dikelompokkan ke dalam aspek isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, buku, peralatan, dan media pembelajaran.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menargetkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan bagi seluruh jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) pada tahun 2014 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2013. SPM pendidikan merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar yang berlaku bagi pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan. SPM untuk pendidikan menengah sampai sekarang masih dalam wacana penyusunan.

Untuk memenuhi SPM pendidikan dasar seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 yang sekarang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupaya untuk merealisasikannya dengan mengalokasikan anggaran sebesar 8,1%. Seiring dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar 8,1 % dari total belanja langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diduga Kabupaten Pesisir Selatan belum dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Permasalahan ini diduga berawal pada ketidakcukupan, ketidakkonsistenan dan rendahnya penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian SPM pendidikan dasar.

Muara dari pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan adalah terealisasinya output yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Output yang dihasilkan mengindikasikan capaian kinerja yang diraih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seyogyanya pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sejalan dengan terpenuhinya Standar

Pelayanan Minimal yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan menggali lebih dalam mengenai anggaran pendidikan yang dihubungkan dengan tingkat pencapaian SPM pendidikan dasar. Penelitian ini dituangkan dalam judul “Analisis Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa masalah yang perlu mendapat kajian lebih mendalam untuk segera mendapat tindak lanjut yang relevan antara lain adalah :

1. Bagaimanakah perkembangan dan tingkat realisasi anggaran pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah tingkat pencapaian kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari sudut pandang indikator yang tertuang dalam standar pelayanan minimal pendidikan dasar?
3. Bagaimanakah kebijakan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian yang akan dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Untuk menganalisis tingkat realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan digunakan data tahun 2014, 2015 dan 2016.
2. Untuk menganalisis tingkat pencapaian kinerja yang dilihat dari tingkat pencapaian SPM pendidikan dasar di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan digunakan data tahun 2016.
3. Untuk menganalisis kebijakan anggaran pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan guna mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar digunakan data tahun 2014, 2015 dan 2016.

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi perkembangan dan tingkat realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Untuk mengidentifikasi pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari sudut pandang indikator yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar pada tahun 2016?
3. Untuk mengidentifikasi kebijakan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar selama 3 (tiga) tahun terakhir?

E. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian seperti tersebut di atas dapat diwujudkan, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih memahami pelaksanaan dan kebijakan anggaran pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Memberikan pandangan kepada pembuat keputusan dalam menyusun anggaran pendidikan agar selalu konsisten dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan bahan banding dalam penelitian yang relevan untuk penelitian di waktu yang akan datang.